

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESTINASI KREO DAN AGROWISATA

Anjar Astuti, Dyah Lituhayu  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

## ABSTRAK

Masalah pariwisata di kota Semarang adalah belum maksimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata di kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi kreowisata dan agrowisata serta untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi kreowisata dan agrowisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi kreowisata dan agrowisata masih belum terlaksana secara maksimal. Ketersediaan fasilitas umum, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya tersedia. Organisasi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdiri dari berbagai pihak serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik cukup membantu kehidupan masyarakat di sekitar destinasi kreowisata dan agrowisata namun masih belum terlaksana secara maksimal. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi kreowisata dan agrowisata adalah komunikasi berupa tumpang tindih pemahaman antar pelaksana kebijakan, sumber daya berupa keterbatasan dana dan belum maksimalnya sumber daya tarik di destinasi kreowisata dan agrowisata, terhambatnya proses perijinan karena kondisi birokrasi yang berbelit, serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas tentang pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.

Kata kunci: pariwisata, pembangunan pariwisata, implementasi kebijakan, kepariwisataan, destinasi kreowisata dan agrowisata

# IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT POLICIES IN CREO AND AGRO-TOURISM DESTINATIONS

## *ABSTRACT*

The problem of tourism in the city of Semarang is the inadequate development and development of tourism destinations and the low quality of facilities and infrastructure to support tourism activities in the city of Semarang. The purpose of this study is to determine the implementation of tourism development policies in creative and agro-tourism destinations and to determine the factors that hinder the implementation of tourism development policies in creo and agro-tourism destinations. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of tourism development policies in creo and agro-tourism destinations is still not maximally implemented. The availability of public facilities, public infrastructure and tourism facilities is not yet fully available. The implementing organization in the implementation of this policy consists of various parties and the social, economic, and political conditions are sufficient to help the lives of the people around the creo and agro-tourism destinations, but they are still not optimally implemented. Factors that hinder the implementation of tourism development policies in creo and agro-tourism destinations are communication in the form of overlapping understandings between policy implementers, resources in the form of limited funds and not maximized resources of attraction in creo and agro-tourism destinations, obstruction of the licensing process due to convoluted bureaucratic conditions, and not yet There is a clear standard operating procedure regarding the implementation of tourism development.

Keywords: tourism, tourism development, policy implementation, tourism, creative and agro-tourism destinations

## PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu keindahan alam. Pariwisata terdiri dari tiga komponen yaitu wisatawan, elemen-elemen geografi dan industri pariwisata. Wisatawan merupakan elemen atau komponen yang sangat penting, karena pariwisata pada hakikatnya adalah pengalaman manusia, sesuatu yang dinikmati, diantisipasi dan diingat sepanjang hidupnya. Elemen geografi meliputi pasar atau daerah yang dapat mendorong minat untuk berwisata, tujuan wisata dan daerah tempat transit dari suatu perjalanan. Elemen ketiga adalah industri pariwisata yang menyangkut tentang usaha atau bisnis dan organisasi yang mengatur produk pariwisata. Ketiga elemen tersebut saling terkait satu sama lain sebagai

suatu sistem yang utuh yakni pariwisata atau *tourism* (Ardika, 2007:29).

Perkembangan Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir ditandai pula dengan banyaknya gedung pencakar langit di berbagai sudut kota. Disisi lain jumlah penduduk Kota Semarang juga begitu pesat. Namun, pesatnya jumlah penduduk Kota Semarang tidak sebanding dengan perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Kota Semarang cukup kaya akan bahan yang dapat di olah sebagai produk wisata dengan daya tariknya yang khusus yang bisa dikembangkan menjadi sajian wisata yang mampu menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Terdapat empat destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Empat

destinasi tersebut dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Taman Wisata Tinomoyo, Wisata Taman Lele, dan Destinasi Kreo dan Agrowisata. Selain empat UPTD tersebut destinasi wisata Kota Semarang dikelola oleh pihak ketiga.

Isu pada urusan kepariwisataan di Kota Semarang adalah belum maksimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata serta rendahnya kualitas sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kota Semarang. Dalam mengembangkan pariwisata Kota Semarang masih banyak menghadapi kendala. Selain itu, kualitas produk pariwisata Kota Semarang yang masih belum berkembang sesuai dengan keinginan pasar.

Potensi yang dimiliki obyek wisata di Kota Semarang masih perlu

untuk dikembangkan lagi dan dikelola secara maksimal, agar dapat menjadi daerah tujuan wisata utama yang paling diminati oleh wisatawan nusantara serta wisatawan mancanegara. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan agar pengembangan obyek wisata tersebut dapat terealisasi dengan baik dan dapat mendatangkan banyak wisatawan.

Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025.

Namun pada kenyataannya masih banyak destinasi wisata di Kota Semarang yang belum memenuhi standar pembangunan destinasi pariwisata kota seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025. Salah satu destinasi pariwisata Kota Semarang yang belum dikelola secara maksimal adalah Destinasi Kreo dan Agrowisata. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Destinasi Kreo dan Agrowisata. Serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan di Destinasi Kreo dan Agrowisata.

## **PEMBAHASAN**

Standar dan sasaran kebijakan berkenaan dengan peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata yang terdiri dari meningkatnya kemudahan akses wisatawan dari Destinasi Kreo dan Agrowisata ke pusat kota dan sekitarnya, meningkatnya jaringan jalan menuju Destinasi Kreo dan Agrowisata,

meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju Destinasi Kreo dan Agrowisata, serta tersedianya moda transportasi untuk memudahkan pengunjung menuju Destinasi Kreo dan Agrowisata.

Standar dan sasaran kebijakan diketahui belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut dapat dilihat bahwa belum terpenuhinya moda transportasi umum oleh pemerintah yang secara langsung menuju Destinasi Kreo dan Agrowisata. Serta belum tersedianya fasilitas wisata yang cukup menarik sehingga pengunjung di Kreo dan Agrowisata mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa fasilitas yang ada di Kreo dan Agrowisata mengalami kerusakan dan belum dibenahi. Fasilitas untuk kebutuhan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kreo dan Agrowisata sendiri belum sepenuhnya terpenuhi.

Pihak yang terlibat dalam

pembangunan Destinasi Kreo dan Agrowisata berasal dari berbagai pihak. Pihak tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Babinkamtibmas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah, CSR dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pihak-pihak tersebut mendukung pelaksanaan pembangunan Destinasi Kreo dan Agrowisata.

Kondisi sosial ekonomi dan politik sudah berjalan dengan baik. Kondisi lingkungan di sekitar Destinasi Kreo dan Agrowisata juga berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh kondisi politik. Namun, beberapa perijinan masih terhambat dikarenakan pimpinan yang memiliki banyak agenda. Disisi lain masyarakat di sekitar Kreo

dan Agrowisata mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan cinderamata, makanan, penyediaan *home stay* dan toilet umum.

Masih terjadi tumpang tindih mengenai pemahaman implementor terhadap pelaksanaan dari peraturan daerah. Adanya tumpang tindih kewenangan serta kurangnya komunikasi antar pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD Kreo dan Agrowisata juga menghambat proses pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kreo dan Agrowisata. Selain itu sosialisasi mengenai Destinasi Kreo dan Agrowisata masih belum dilakukan dengan maksimal.

Sumber daya yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kreo dan Agrowisata yaitu sumber daya manusia, sumber dana serta daya tarik wisata. Sumber

daya manusia non Aparatur Sipil Negara yang digaji berdasarkan anggaran APBD mempengaruhi dana yang diperoleh untuk melaksanakan pembangunan. Sumber dana yang diberikan melalui APBD belum bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh sehingga menghambat pembangunan daya tarik wisata dan juga menghambat dana pemeliharaan kantor UPTD Kreo dan Agrowisata.

Pelaksana kebijakan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan perda Ripparkot Semarang. Standar Operasional Prosedur tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, Standar Operasional Prosedur juga menjadi penghambat para pelaksana kebijakan

karena perijinan dan adanya tumpang tindih kewenangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi kreowisata dan agrowisata Belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh dana dan sumber daya yang belum maksimal, serta pengetahuan pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya paham tentang isi kebijakan tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan implementasi peraturan daerah kota Semarang nomor 5 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kota Semarang tahun 2015-2025 masih terdapat kekurangan sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan adalah melestarikan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu tradisi sesaji rewanda, dengan melakukan promosi yang menarik melalui

berbagai media agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi Destinasi Kreo dan Agrowisata. Selain itu perbaikan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata serta menyediakan alat transportasi menuju destinasi kreo dan agrowisata.

2. Penyediaan dana operasional dan pembangunan yang memadai

sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan dan perawatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ardika, I Wayan. 2007. *Pustaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Kadji, yulianto. 2015. Formulasi dan implementasi kebijakan public. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Kismartini, Dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Mulyadi, Dedy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, CV.

Swastha, Basu & Handoko, Hani. 2011. *Manajemen Pemasaran- Analisis Perilaku*



*Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.

Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tachjan. 2006. Implementasi kebijakan public. Bandung: aipi

Utama I.G.B.R. Gusti dan Eka, Made. 2012. *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Akasara.

Yoeti, Oka A. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015- Tahun 2025.

### **Jurnal:**

Manullang, Arna. 2016. *Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (Ripp) Provinsi Jawa Tengah di Destinasi Wisata Sam Poo Kong Kota Semarang*. Dalam laman

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/17856&ved=2ahUKEwirluC74dfkAhVtLcAHeT7A14QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2ULDaXpwGBX0u19NBWwH7a>.

Permana, Zelado. 2017. *Implementation of Tourism Promotion Policy in Semarang City*. Dalam laman

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11008&ved=2ahUKEwj1iL-n4dkAhVxIbcAHXp\\_BfcQFAAegQIBxAC&usg=AOvVaw173ptDWVVayRc23\\_UzHL77](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11008&ved=2ahUKEwj1iL-n4dkAhVxIbcAHXp_BfcQFAAegQIBxAC&usg=AOvVaw173ptDWVVayRc23_UzHL77).

Hidayat, Rahmat. 2018. Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di Ntb (Studi

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Ntb No. 2 Tahun 2016

Tentang Pariwisata Halal).

[Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jiap/Issue/View/111](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jiap/Issue/View/111). Vol. 7, No. 2.

**Internet:**

Made, Asdhiana. 2016. Harian Kompas. *Pariwisata Jateng, Potensi Besar, tetapi Pertumbuhan Ekonomi Rendah*. <https://Travel.Kompas.Com/Read/2016/04/21/234000327/Pariwisata.Jateng.Potensi.Besar.Tetapi.Pertumbuhan.Ekonomi.Rendah>. Diakses Pada 19 Oktober 2018.